



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIASI**

***THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL, FOLLOW-UP OF AUDIT FINDINGS ON FRAUD PREVENTION WITH THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS AS MEDIATION***

**Muslianti Middin<sup>1\*</sup>, Antong Antong<sup>2</sup>, Halim Usman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo*

\*Email: [musliantim2002@gmail.com](mailto:musliantim2002@gmail.com)

**Keywords**

*Internal control, follow-up on audit findings, quality of financial reports, fraud prevention*

**Article informations**

*Received:*

*2023-02-26*

*Accepted:*

*2023-07-17*

*Available Online:*

*2023-07-29*

**Abstract**

*This study examines the impact of internal control & follow-up audit findings on fraud prevention, with the quality of financial reports as mediation at the Luwu Raya Inspectorates, using quantitative methods & analyzed using a descriptive approach. The population includes all auditors at the Luwu Raya Inspectorates, the sampling technique uses a saturated sample where all members of the population are sampled, the sample in this study is all auditors at the Luwu Raya Inspectorates with 61 respondents. Data analysis using SEM-PLS (SmartPLS). The research results show that internal control, follow-up on audit findings and the quality of financial reports have a significant influence on fraud prevention. Then, internal control & the follow-up of audit findings have a significant effect on the quality of financial reports, as well as the relationship between follow-up audit findings through the quality of financial reports on fraud prevention where the quality of financial reports is able to mediate the follow-up of audit findings on fraud prevention. Meanwhile, the relationship between internal control through the quality of financial reports on fraud prevention does not have a significant effect.*

**PENDAHULUAN**

*Fraud* masih menjadi permasalahan yang berkelanjutan hingga saat ini, baik itu pada perusahaan swasta, non-swasta maupun dalam lingkup pemerintahan sekalipun. Berdasarkan data ACFE Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa mayoritas tindakan kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah 64.4% dari tindak korupsi, diikuti oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara yakni 28.9% serta *fraud* laporan keuangan dengan 6.7%. Fakta ini menunjukkan bahwa berbagai tindakan penipuan yang sering terjadi di Indonesia didominasi oleh praktik korupsi. Tingginya angka *fraud* di Indonesia menjadikan pemerintah daerah berada pada urutan pertama dengan kasus *fraud* tertinggi. Sebesar 66% kasus KPK pada 2018-2022 merupakan perkara korupsi pemerintah daerah (KPK 2022). Fahmi dan Syahputra (2019) menyatakan kecurangan (*Fraud*) adalah setiap perbuatan melawan hukum termasuk penyembunyian, penipuan, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan tersebut tidak



memerlukan penggunaan kekuatan atau intimidasi secara lisan. Penipuan bisa dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan tujuan memperoleh uang, barang ataupun jasa, tanpa membayar atau mengalami kerugian, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis melalui observasi, pengkajian, serta pemeriksaan dalam implementasi atas tugas yang telah diberikan di berbagai unit organisasi, akan ditentukan apakah telah dilakukan secara konsisten dan sesuai standar.

Dalam rangka pencegahan *fraud* di lembaga publik, terdapat beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pihak terkait. Tingginya praktik kecurangan dalam lingkup pemerintah daerah telah memicu kesadaran dari berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud*. Salah satu upaya untuk mencegah penipuan adalah penerapan dan menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif di lembaga yang relevan. Dalam Iriansyah *et al.* 2020 menjelaskan bahwa inspektorat daerah berperan sebagai salah satu divisi yang melaksanakan pemeriksaan dan audit terhadap lembaga pemerintah daerah. Inspektorat bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan umum pemerintah daerah serta menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Dalam hal ini, peran inspektorat dalam menjalankan tugasnya serupa dengan peran auditor internal. Berdasarkan ACFE Indonesia (2019) bahwa salah satu pengendalian internal yang berkontribusi dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia adalah dengan adanya Audit Internal, dimana audit internal memiliki peran penting sebagai salah satu sarana pendeteksi dini yang cukup dapat diandalkan oleh sebuah organisasi.

Pemerintah dalam upayanya untuk mencegah *fraud* di Indonesia telah meluncurkan berbagai sistem yang semuanya memiliki tata kelola yang baik sebagai tujuan utamanya. Administrasi pemerintahan tidak diragukan lagi melibatkan berbagai tugas, mulai dari perencanaan hingga implementasi serta tanggung jawab hingga pengawasan dan penilaian. Akibatnya, pemerintah mengembangkan sistem yang dapat mengawasi semua aspek pelaksanaan pemerintahan agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem tersebut adalah SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. (Indriani 2021). Menurut ketentuan yang tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP adalah suatu proses yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan dan juga karyawan secara tetap. Tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, untuk memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan, untuk melindungi aset negara dan pemerintahan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.

Upaya lainnya yang dapat membentengi instansi tersebut dari tindakan *fraud* yaitu bagaimana tindak lanjut atas temuan audit. Inspektorat pusat atau daerah melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa dari pemerintah pusat/daerah sesuai dengan proses pemeriksaan internal, dan inspektorat juga selalu memberikan rekomendasi kepada pihak yang sedang diperiksa agar setiap temuan pemeriksaan dapat diperbaiki. BPK mengikuti proses yang sama dengan audit luar, untuk menyelesaikan masalah keuangan subjek pemeriksaan, BPK biasanya membuat saran berdasarkan hasil pemeriksaan (Imtinan, 2020). Selain memberikan opini pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan hasil temuan dan memberikan rekomendasi kepada entitas Perangkat Daerah yang menerima masukan tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Adapun temuan yang berkaitan dengan kerugian daerah atau negara perlu dengan segera mengambil langkah tindak lanjut guna terhindar dari masalah hukum di masa depan (Juniati 2021).

Upaya pemerintah pada setiap sektor organisasi atau instansinya agar terus berintegritas dan berupaya dalam menerapkan sistem yang baik dan sesuai standar yang ada agar dapat mencegah terjadinya pencegahan *fraud* dapat ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya, Imtinan (2021) menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan dalam laporan

keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan tindak lanjut audit. Sebab, ada upaya untuk mematuhi saran dan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mendorong peningkatan pencegahan kecurangan. Dalam penelitian Fahmi dan Syahputra (2019) menjelaskan bahwa audit internal yang telah dilakukan berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan di PT. Pos Indonesia Regional I Sumut, Aceh. Hal tersebut terjadi karena implementasi pengendalian internal telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian lainnya oleh Wonar *et al.* (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan penipuan (*fraud*), salah satu yang mendasari hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai dalam organisasi.

Berdasarkan riset sebelumnya, hasil yang diperoleh tidak konsisten dan bervariasi tergantung pada variabel yang diteliti, maka dalam riset ini, digunakan variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu pengendalian internal & tindak lanjut atas temuan audit terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*. Kualitas laporan keuangan digunakan sebagai variabel mediasi pada riset ini. Manajemen memiliki salah satu tujuan utama dalam merancang SPI, yaitu memastikan terciptanya pelaporan keuangan yang dapat diandalkan (Susanti dan Budiwitjaksono 2019). Menurut Fauzi dan Wardono (2022) dalam peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, salah satu tujuan audit yakni untuk menciptakan pengawasan yang efisien pada tingkat yang wajar. Wonar *et al.* (2018) menjelaskan bahwa staf yang kompeten namun memiliki pemahaman akuntansi yang buruk dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan yang tidak profesional dan meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Artinya, untuk mencegah terjadinya kecurangan, kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal harus berjalan selaras. Sumber daya organisasi dikelola, dipantau, dan diukur oleh sistem pengendalian internal (SPI). Sistem tersebut juga memiliki peran krusial dalam pencegahan dan deteksi dini tindakan penipuan (Kustiawan 2016) serta, merupakan unsur utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pada penelitian terdahulu salah satunya dipengaruhi karena beberapa mekanisme penerapan sistem pada tiap lingkungan instansi mengalami beberapa perbedaan dan kendala yang berbeda pula. Namun, sepatutnya instansi atau organisasi yang baik yaitu yang dapat menerapkan SPI dan bagaimana tindak lanjut temuan audit telah sesuai dengan peraturan serta, standar yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia. Riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat dan pihak lainnya, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud***

*Fraud* merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu organisasi. Kemungkinan terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian organisasi, kurangnya pengawasan, serta penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Marciano *et al.* (2021) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan. Komponen-komponen tersebut memiliki peran yang signifikan dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan terhadap kecurangan. Kelima komponen yang saling berhubungan tersebut harus digunakan secara konsisten. Kelima komponen ini semuanya bekerja sama untuk saling mendukung, sehingga jika salah satunya tidak digunakan, maka efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan diragukan. Menurut Armelia (2020), jika sistem pengendalian internal diterapkan secara optimal, maka upaya pelaksanaan dalam mencegah *fraud* akan semakin efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Armelia (2020) dan Marciano *et al.* (2021) menunjukkan hasil yang sejalan,



yakni bahwa penerapan pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan.

**H<sub>1</sub>: Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.**

#### ***Tindak Lanjut Temuan Audit dan Pencegahan Fraud***

Langkah awal perbaikan setelah proses audit (audit rectification) memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dari sekedar mendeteksi temuan audit. Hal tersebut disebabkan, jika tindakan perbaikan tidak dilakukan setelah audit, tindakan korupsi dan pelanggaran akan terus berlanjut (Aminah 2020), padahal perbaikan dapat meningkatkan efektivitas dalam suatu proses audit dan mencegah atau mengantisipasi temuan serupa dimasa depan. Mauristela (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan fraud.

**H<sub>2</sub>: Tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.**

#### ***Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus memiliki kualitas sebagai berikut: relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diterima, laporan tersebut harus memenuhi keempat persyaratan tersebut. Laporan keuangan yang baik tidak hanya memuat keutuhan data dan informasi didalamnya, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas seluruh informasi dalam laporan tersebut. Ketika auditor Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan memverifikasi informasi tersebut, maka informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dianggap berkualitas jika informasi yang tersaji didalamnya telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan penelitian oleh Triwahyudi (2020), dimana menjelaskan bahwa peneliti percaya bahwa pelaporan keuangan yang baik memiliki dampak menguntungkan pada pencegahan fraud.

**H<sub>3</sub>: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.**

#### ***Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan***

Pengendalian internal adalah teknik untuk mengelola sumber daya dalam suatu organisasi dan memegang peranan krusial dalam pencegahan dan pengungkapan kecurangan serta penyelewengan. Pengendalian internal memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam studi yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020), ditemukan bahwa terdapat hubungan antara SPI dan tingkat akurasi laporan keuangan. Dalam konteks ini, pengendalian internal yang efektif dapat berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan yang akurat, serta berkualitas. Keandalan akuntansi (keandalan laporan keuangan) adalah salah satu tujuan pengendalian internal, karenanya, untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, penting untuk mendukung pengendalian internal yang efektif (Susanti dan Budiwidjaksono 2019).

**H<sub>4</sub>: Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### ***Tindak Lanjut Temuan Audit dan Kualitas Laporan Keuangan***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap keuangan negara yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, & pemeriksaan dengan tujuan khusus. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk opini, temuan, & rekomendasi. Opini memberikan penilaian keseluruhan tentang kualitas laporan keuangan dan kinerja entitas yang diperiksa. Sementara itu, temuan dan rekomendasi mengungkapkan temuan yang relevan dan memberikan saran untuk perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. Temuan audit BPK merupakan kejadian di mana suatu daerah telah melanggar ketentuan dan/atau peraturan pengendalian internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam LK pemerintah, sehingga akan berdampak pada kesimpulan pemeriksa setelah dilakukan

pemeriksaan, dikarenakan dalam setiap temuan audit harusnya disertai dengan tindak lanjut hasil audit, maka temuan audit dapat dianggap tidak berarti tanpa adanya tindak lanjut. Imtinan (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tindak lanjut dari hasil audit/pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam LK. Semakin besar jumlah informasi yang terungkap, semakin baik mutu laporan keuangan yang dihasilkan. Tingkat pengungkapan yang tinggi menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang baik. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan, maka semakin tinggi juga kualitasnya.

**H5: Tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### ***Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud***

Menurut Armelia (2020), SPI merupakan kumpulan kebijakan, tindakan, serta mekanisme yang diberlakukan didalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk melindungi aset, membuktikan keunggulan & keakuratan catatan informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam kegiatan kelembagaan, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan manajemen. Pengendalian internal yang diterapkan secara memadai dalam perusahaan dapat membantu menghindari penipuan. Dengan memiliki pengendalian internal yang baik, seseorang dapat mengurangi kemungkinan penipuan dengan memastikan bahwa operasi operasional dilakukan dengan sukses dan efisien. Dari penjelasan hipotesis sebelumnya diatas, adanya variabel mediasi yaitu kualitas laporan keuangan diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat se-Luwu Raya.

**H6: Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dimediasi oleh kualitas laporan keuangan.**

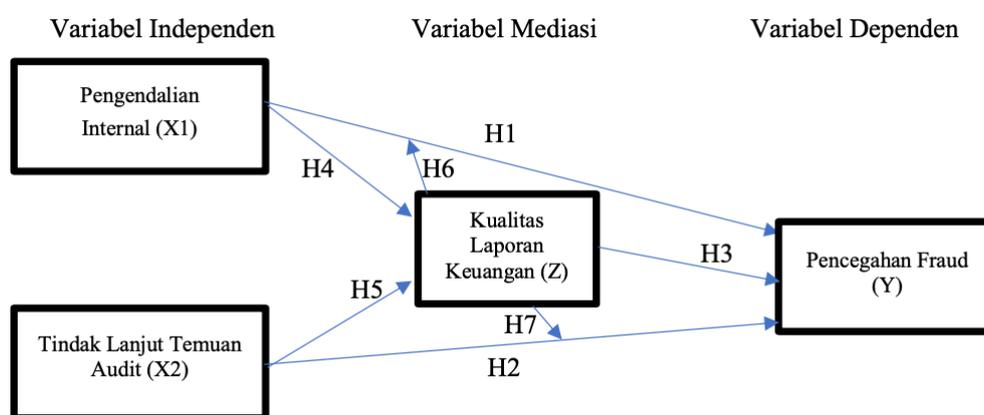
#### ***Tindak Lanjut Temuan Audit, Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud***

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengembal amanah rakyat, salah satunya adalah mengelola dana masyarakat secara beretika dan transparan, namun pada kenyataannya banyak sekali kegiatan tidak jujur yang merugikan bidang sosial dan ekonomi. Temuan audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tanda lain bahwa ada masalah dengan bagaimana lembaga pemerintah mengelola keuangan mereka. Dengan adanya tindak lanjut temuan audit diharapkan lembaga atau instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporannya sehingga dapat memperkuat upaya dalam pencegahan kecurangan dalam lingkup instansi. Musdafiah (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial, terbukti bahwa audit investigasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya untuk mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat audit investigasi, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu, secara bersamaan, audit investigasi juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya untuk mengurangi penipuan dalam laporan keuangan.

**H7: Tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dimediasi oleh kualitas laporan keuangan.**



### Model Gambar Kerangka Konseptual



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat di wilayah Luwu Raya, yang berjumlah 81 auditor. Mereka terbagi menjadi 23 auditor di Luwu Timur, 31 auditor di Luwu Utara, 11 auditor di Luwu, dan 16 auditor di Kota Palopo. Dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel karena jumlah populasi yang relatif kecil. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Kantor Inspektorat se-Luwu Raya, dengan jumlah responden sebanyak 61 auditor.

### Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang akan diberikan kepada responden terkait. Data primer adalah informasi yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber aslinya atau responden secara langsung (Sekaran dan Bougie 2017). Survei dilakukan menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) opsi jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan materi dan data yang relevan berdasarkan isu penelitian, dengan memastikan kualitas dan keandalan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei melalui penggunaan kuesioner. Serta, metode literatur adalah cara untuk mengumpulkan data/informasi berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari bahan pustaka (buku teks), jurnal, petunjuk teknis, maupun bentuk atau sumber lain yang terkait penelitian ini. Sumber pustaka tersebut dapat berasal dari lembaga perpustakaan maupun dari badan yang relevan dengan topik penelitian, baik secara manual maupun digital dan *online*.

### Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel mediasi. Terdapat dua variabel independen diantaranya pengendalian internal ( $X_1$ ) dan tindak lanjut temuan audit ( $X_2$ ). Variabel dependen adalah pencegahan penipuan ( $Y$ ), sedangkan kualitas laporan keuangan ( $Z$ ) merupakan variabel mediasi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis indikator dan skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini, diperlukan operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, berikut akan disajikan penjelasan mendalam mengenai variabel-variabel yang

terlibat.

**Tabel 1**

**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan (Z)	Kualitas laporan keuangan adalah parameter normatif yang harus terpenuhi dalam menyajikan informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (SAP 2010). Laporan keuangan yang berkualitas baik adalah LK yang memenuhi unsur-unsur karakteristik standar dari laporan keuangan (Wiguna <i>et al.</i> 2021).	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, LK pemerintah diharapkan memiliki kualitas berikut: 1. Relevan, 2. Dapat dipercaya, 3. Dapat dibandingkan, dan 4. Dapat dipahami.	Ordinal
2	Pencegahan Fraud (Y)	Secara umum, upaya pencegahan penipuan melibatkan penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa direksi, manajemen, & karyawan perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tiga tujuan utama, yakni keandalan pelaporan keuangan, efektivitas & efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku (COSO 1992).	1. Struktur pengendalian internal yang baik, 2. Efektivitas aktivitas pengendalian, 3. Kultur organisasi, dan 4. Efektivitas fungsi internal audit. (Amrizal 2004)	Ordinal
3	Pengendalian Internal (X <sub>1</sub> )	Pengendalian internal meliputi semua upaya untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal merujuk pada suatu proses menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para pimpinan dan pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan, melindungi aset negara, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI Pemerintah yang diterapkan badan pemerintah dalam menjalankan pengendalian internalnya, mencakup 5 (lima) fokus pengendalian, yakni: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko; 3. Kegiatan pengendalian; 4. Informasi dan komunikasi; dan 5. Pemantauan.	Ordinal
4	Tindak Lanjut Temuan Audit (X <sub>2</sub> )	Tindak lanjut temuan audit merujuk pada langkah-langkah yang diambil setelah hasil audit diperoleh. Ini melibatkan penanganan dan penyelesaian masalah yang diidentifikasi dalam laporan audit. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak hanya	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas temuan pemeriksaan terdiri dari: 1. Sistem Pengendalian Intern; dan 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Ordinal



No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		terdiri dari opini saja, tetapi juga mencakup catatan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan audit ditangani dengan tepat dan langkah-langkah pencegahan diterapkan agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.		

Sumber: Data Olahan (2023)

### Teknik Analisis

Riset ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4 dalam melakukan analisis *Structural Equation Modelling – Partial Least Square* (SEM-PLS). SEM-PLS merupakan uji statistik multivariat pengembangan dari regresi dan analisis jalur. Model evaluasi dalam PLS terdiri dari model pengukuran (*outer model*) yang menunjukkan hubungan antara variabel dengan item pengukuran yang digunakan untuk mengukurnya dan model struktural (*inner model*) yang menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel penelitian/hipotesis penelitian yang dibangun (Yamin, 2023). Penggunaan *SmartPLS* sangat disarankan dalam situasi di mana terdapat keterbatasan jumlah sampel namun model yang dibangun cukup kompleks (Muhson, 2022).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Responden penelitian

Partisipan dalam penelitian ini meliputi semua auditor yang bekerja di Inspektorat di seluruh wilayah Luwu Raya. Kuesioner penelitian disebar dengan menggunakan *google form* dalam pendistribusian kuesioner pada seluruh tahapan. Kuesioner penelitian didistribusikan pada responden sebanyak 81 kuesioner, dimana dalam batas waktu yang telah ditentukan, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari responden sebanyak 61 kuesioner. Berikut disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2

### Jumlah Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	81
Kuesioner kembali	61
Sampel yang dapat digunakan dalam penelitian	61

Sumber: Data Olahan (2023)

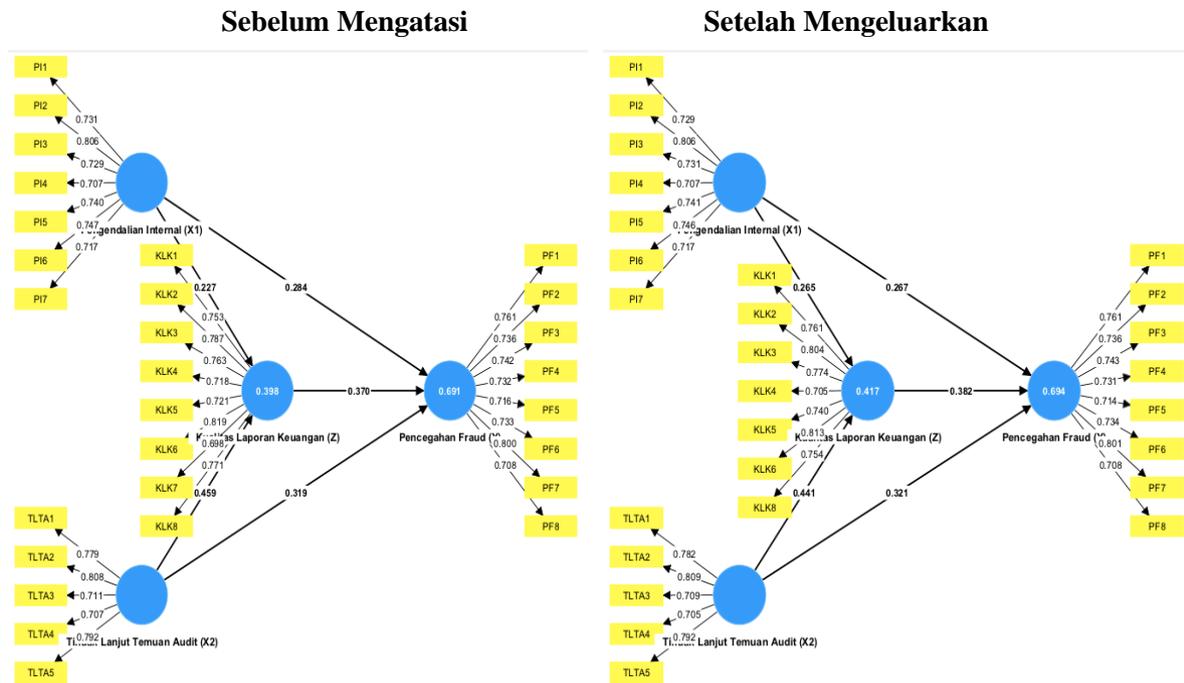
### Analisis *Partial Least Square (PLS) Model Pengukuran (Outer Model)*

Dalam tahap awal evaluasi model menggunakan metode *Partial Least Squares (PLS)*, model pengukuran (*outer model*) evaluasi dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Saat menganalisis data dengan SmartPLS, evaluasi outer model dilaksanakan berdasarkan tiga kriteria: validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa pengukuran konstruk harus berkorelasi secara signifikan satu sama lain. Validitas diskriminan mengacu pada prinsip bahwa pengukuran konstruk yang berbeda tidak boleh menunjukkan korelasi yang tinggi. Pengujian reliabilitas digunakan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk yang diteliti (Ghozali, 2021).

### Uji Validitas Konvergen

Dalam analisis validitas konvergen menggunakan SmartPLS, hal tersebut dapat dievaluasi melalui beberapa metode, seperti melihat nilai *loading factor (LF)* untuk setiap indikator konstruk dan nilai *average variance extracted (AVE)* untuk mengukur korelasi antara

skor indikator dan skor variabel latennya. Berdasarkan *Rule of Thumb* yang dijelaskan oleh Hair et al (2021), untuk mengevaluasi validitas konvergen, nilai LF harus  $\geq 0.70$ , serta nilai AVE harus  $\geq 0.50$ . Validitas konvergen memiliki tujuan untuk mengidentifikasi keabsahan hubungan antara setiap indikator dengan konstruk atau variabel laten yang terkait.



**Gambar 2**  
**Model PLS sebelum mengatasi dan setelah mengeluarkan indikator**  
 Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Pada gambar 2, diperoleh hasil bahwa sebelum mengatasi indikator terdapat nilai LF  $\leq 0.70$ , sehingga perlu mengeluarkan indikator tersebut. Indikator tersebut adalah indikator yang berada di kualitas laporan keuangan yakni KLK7, indikator tersebut selanjutnya dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan validitas indikator. *Outlier* tersebut dilakukan agar memenuhi asumsi validitas dan reabilitas pada outer model, hal tersebut dilakukan dengan menghilangkan satu atau bahkan lebih indikator yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel latennya. Setelah mengeluarkan indikator tersebut diketahui setiap indikator memiliki LF  $\geq 0.70$ , dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator pada variabel telah memenuhi persyaratan sehingga tidak perlu di eliminasi lagi dari model.

Pengujian validitas konvergen berikutnya dalam penelitian ini juga dapat ditemukan pada nilai *average variance extracted* (AVE) dengan nilai  $\geq 0.50$ , yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Nilai Average Variance Extracted (AVE) Validitas Konvergen**

KLK (Z)	PF (Y)	PI (X1)	TA(X2)
0.586	0.550	0.548	0.579

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Pada tabel 3, ditunjukkan bahwa dalam nilai AVE setiap variabel  $\geq 0.50$ , hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai AVE pada variabel tersebut telah valid dimana telah terpenuhi syarat validitas konvergen yang baik.



### Uji Validitas Diskriminan

Uji yang didasarkan pada validitas diskriminan dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap indikator dari setiap variabel laten memiliki perbedaan yang signifikan dengan variabel lainnya, yang seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi antara pengukuran konstruk yang berbeda. Indikator dan variabel menjadi fokus uji validitas diskriminan. Pada tingkat indikator, digunakan cross loadings yang mengindikasikan bahwa setiap item pengukuran yang mengukur suatu konstruk akan memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabel yang sedang diukurnya, sementara memiliki korelasi yang rendah dengan variabel lainnya.

**Tabel 4**  
**Nilai Korelasi Cross Loadings**

	<b>KLK (Z)</b>	<b>PF (Y)</b>	<b>PI (X1)</b>	<b>TLTA (X2)</b>
KLK1	<b>0.761*</b>	0.532	0.377	0.339
KLK2	<b>0.804*</b>	0.643	0.406	0.479
KLK3	<b>0.774*</b>	0.521	0.545	0.474
KLK4	<b>0.705*</b>	0.565	0.323	0.422
KLK5	<b>0.740*</b>	0.517	0.546	0.471
KLK6	<b>0.813*</b>	0.534	0.421	0.532
KLK8	<b>0.754*</b>	0.568	0.328	0.548
PF1	0.536	<b>0.761*</b>	0.625	0.623
PF2	0.620	<b>0.736*</b>	0.488	0.553
PF3	0.546	<b>0.743*</b>	0.510	0.567
PF4	0.520	<b>0.731*</b>	0.442	0.508
PF5	0.422	<b>0.714*</b>	0.379	0.431
PF6	0.453	<b>0.734*</b>	0.611	0.543
PF7	0.646	<b>0.801*</b>	0.571	0.546
PF8	0.526	<b>0.708*</b>	0.390	0.520
PI1	0.291	0.501	<b>0.729*</b>	0.402
PI2	0.425	0.565	<b>0.806*</b>	0.474
PI3	0.348	0.490	<b>0.731*</b>	0.548
PI4	0.333	0.492	<b>0.707*</b>	0.558
PI5	0.450	0.518	<b>0.741*</b>	0.586
PI6	0.514	0.541	<b>0.746*</b>	0.475
PI7	0.458	0.434	<b>0.717*</b>	0.318
TLTA1	0.499	0.593	0.561	<b>0.782*</b>
TLTA2	0.482	0.612	0.483	<b>0.809*</b>
TLTA3	0.293	0.450	0.524	<b>0.709*</b>
TLTA4	0.493	0.501	0.501	<b>0.705*</b>
TLTA5	0.523	0.586	0.422	<b>0.792*</b>

\*Nilai cross loading variabel laten berkorelasi  $\geq$  dari variabel laten lainnya

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel 4, nilai korelasi cross loadings setiap indikator dengan korelasi antar variabel laten, secara keseluruhan item pengukuran menunjukkan korelasi yang lebih tinggi dengan variabel yang sedang diukur daripada dengan variabel lainnya, sehingga kriteria validitas diskriminan terpenuhi. Validitas diskriminan pada tingkat variabel dapat diukur menggunakan *Fonell-Lacker Criterion* dan *Heteroid Monotrait Ratio* (HTMT). Ukuran kriteria *Fonell-Lacker Criterion* mengindikasikan bahwa model memiliki validitas diskriminan yang baik jika akar AVE dari variabel tersebut lebih besar daripada korelasi antara variabel tersebut. Berikut nilai korelasi *Fonell-Lacker Criterion* dalam penelitian ini.

**Tabel 5**  
**Nilai Korelasi Fonell-Lacker Criterion**

	KLK (Z)	PF (Y)	PI (X1)	TLTA (X2)
Kualitas Laporan Keuangan	<b>0.765*</b>			
Pencegahan Fraud	0.726	<b>0.741*</b>		
Pengendalian Internal	0.552	0.686	<b>0.740*</b>	
Tindak Lanjut Temuan Audit	0.613	0.728	0.649	<b>0.761*</b>

Nilai dalam sumbu diagonal ialah akar AVE & nilai lainnya ialah korelasi  
\*Nilai akar AVE > korelasi antara variable

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel 5, dalam analisis variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai akar AVE dari masing-masing variabel tersebut lebih besar daripada nilai korelasinya, secara keseluruhan validitas diskriminan terpenuhi. Selanjutnya, ukuran kriteria HTMT dengan nilai yang direkomendasikan dibawah 0.90 (Hair et al. 2021). Nilai HTMT dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Nilai HTMT**

	KLK (Z)	PF (Y)	PI (X1)
Kualitas Laporan Keuangan			
Pencegahan Fraud	0.815		
Pengendalian Internal	0.623	0.774	
Tindak Lanjut Temuan Audit	0.705	0.842	0.779

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Pada tabel 6 diatas, nilai HTMT setiap variabel dalam penelitian ini kurang dari 0.90, maka evaluasi validitas diskriminan terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa parameter dalam pengujian validitas diskriminan baik pada tingkat indikator maupun pada tingkat variabel dalam penelitian ini telah terpenuhi.

#### Uji Reabilitas

Dalam analisis PLS-SEM, selain menguji validitas, juga dilakukan pengujian reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan akurat, konsisten, & tepat dalam mengukur konstruk yang diteliti. Dalam hal ini, *SmartPLS* menyediakan dua metode untuk mengukur reliabilitas, yaitu menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Menurut Ghozali (2021), jika nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang dihasilkan  $\geq 0,70$ , maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk yang diukur dalam penelitian tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Pengujian dengan kriteria menyelidiki nilai *Cronbach's Alpha* dan *rho A* (dapat menggunakan salah satu atau keduanya) digunakan untuk menyelidiki kehandalan atau reliability instrumen pertanyaan pada setiap variabel laten, adapun *Composite reliability* berkaitan dengan seberapa handal atau baik instrumen pertanyaan dapat mengukur variabel laten. Pada Tabel 7 berikut merupakan hasil dari pengujian reabilitas.



**Tabel 7**  
**Nilai Cronbach's Alpha, rho\_A & Composite Reliability**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Kualitas Laporan Keuangan (Z)	0.882	0.883	0.908
Pencegahan Fraud (Y)	0.883	0.887	0.907
Pengendalian Internal (X <sub>1</sub> )	0.862	0.866	0.894
Tindak Lanjut Temuan Audit (X <sub>2</sub> )	0.818	0.826	0.872

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Pada tabel diatas, nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel laten menunjukkan nilai  $\geq 0,70$ , begitupun untuk nilai *rho A* yang menunjukkan nilai  $\geq 0.70$ , sehingga disimpulkan reliability telah terpenuhi untuk setiap variabel laten. Nilai *Composite Reliability* (CR) untuk setiap variabel laten menunjukkan angka  $\geq 0.70$ , sehingga dapat disimpulkan cukup handal dan data yang digunakan sudah konsisten. Berdasarkan pengujian reabilitas dalam penelitian ini, nilai keseluruhan parameter ialah  $\geq 0.70$ , dimana dalam hal ini telah terpenuhi.

*Model Struktural (Inner Model)*

Evaluasi ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan antara variabel laten, di mana pengujian ini menguji kemampuan prediktif dari model struktural. *R-Square* dan uji signifikansi adalah dua komponen yang digunakan sebagai kriteria dalam evaluasi model struktural (*inner model*). Nilai *R-Square* menggambarkan pengaruh keseluruhan variabel eksogen/endogen terhadap variabel endogen lainnya. Nilai *R-Square* sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 masing-masing mengindikasikan bahwa model tersebut kuat, moderat, dan lemah (Hair et al. 2021). Uji signifikansi dilakukan untuk memahami pengaruh antara variabel-variabel (eksogen terhadap endogen) dan uji ini dilakukan menggunakan metode bootstrapping dalam aplikasi *SmartPLS*. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu two-tailed, dengan nilai t-value 1,65 (tingkat signifikansi = 10%), 1,96 (tingkat signifikansi = 5%), dan 2,58 (tingkat signifikansi = 1%) (Ghozali 2021). Sehingga, kriteria untuk menerima atau menolak hipotesa adalah sebagai berikut:  $H_a$  = diterima dan  $H_0$  = ditolak, jika nilai t-statistik  $\geq 1,96$  dan untuk probabilitas,  $H_a$  diterima jika nilai  $p \leq 0,05$ .

*R-Square*

**Tabel 8**  
**Nilai R-Squared Konstruksi Jalur**

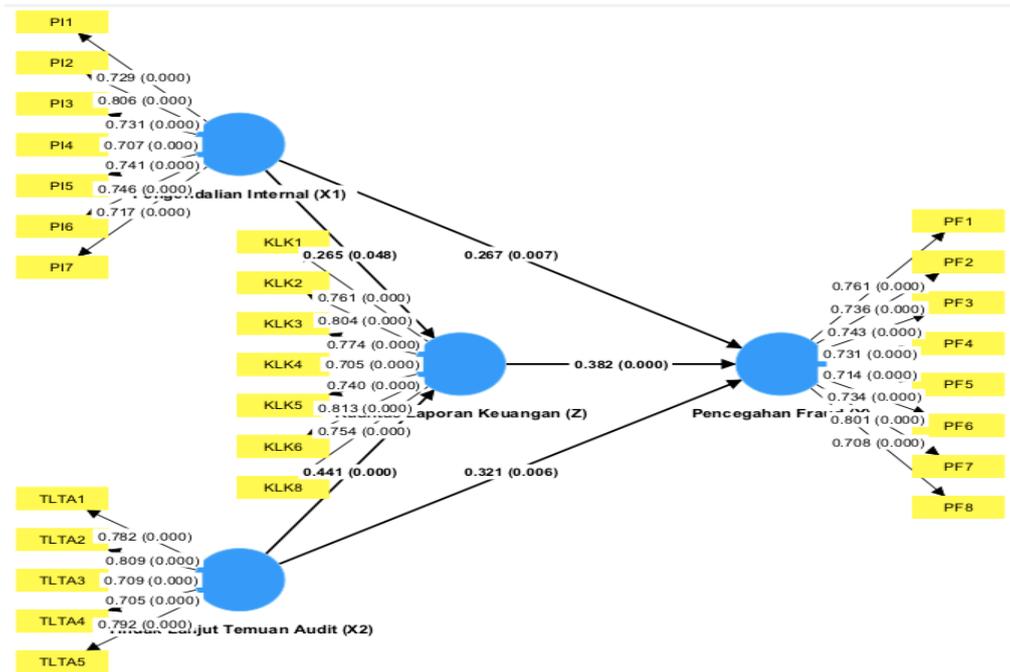
	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan (Z)	0.417	0.397
Pencegahan Fraud (Y)	0.694	0.678

Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan diatas, besarnya pengaruh bersama untuk pengaruh pengendalian internal & tindak lanjut temuan audit terhadap jalur kualitas laporan keuangan memiliki *R-Square* dengan 0.417 atau sebesar 41.7%, yang berarti besar pengaruh gabungan dari hasil pengendalian internal dan tindak lanjut temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 41,7% (berpengaruh lemah mendekati moderat), dimana 58,3% selebihnya terikat dengan variabel laten lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Pada jalur pencegahan *fraud* yang dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan, pengendalian internal dan tindak lanjut temuan audit memiliki nilai sebesar 0.694 atau 69.4%. Nilai *R Square* tersebut menunjukkan pengaruh gabungan sebesar 69.4% (berpengaruh moderat mendekati tinggi), dimana 30.6% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.

*Pengujian Hipotesis Penelitian (Uji Signifikansi)*

Hasil estimasi parameter model menggunakan *SmartPLS* untuk pengujian hipotesis diberikan sebagai berikut.



**Gambar 3**  
**Parameter Konstruksi Model**  
*Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)*

Untuk mengetahui signifikansi model prediksi dalam model struktural yang terdapat dalam Gambar 5, kita dapat melihat nilai t-statistik atau *p-value* dari hasil *bootstrapping* model yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**Pengujian Hipotesis Model Struktural (Direct Effect)**

	Path Koefisien	T Statistics	P Values	Keterangan
KLK (Z) → PF (Y)	0.382	3.489*	0.000**	H <sub>1</sub> diterima
PI (X <sub>1</sub> ) → KLK (Z)	0.265	1.975*	0.048**	H <sub>2</sub> diterima
PI (X <sub>1</sub> ) → PF (Y)	0.267	2.687*	0.007**	H <sub>3</sub> diterima
TLTA (X <sub>2</sub> ) → KLK (Z)	0.441	3.730*	0.000**	H <sub>4</sub> diterima
TLTA (X <sub>2</sub> ) → PF (Y)	0.321	2.773*	0.006**	H <sub>5</sub> diterima

\*t-statistik ≥ 1.96, signifikan

\*\*p-value ≤ 0.05, signifikan

*Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)*

Pada tabel 9, kita dapat mengamati pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai t-statistik atau nilai *p-value* diatas, diketahui bahwa hubungan antara variabel berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 10**  
**Pengujian Hipotesis Model Struktural (Indirect Effect)**

	Path Koefisien	T Statistics	P Values	Keterangan
PI (X <sub>1</sub> ) → KLK (Z) → PF (Y)	0.101	1.623	0.105	H <sub>6</sub> ditolak
TLTA (X <sub>2</sub> ) → KLK (Z) → PF (Y)	0.169	2.779*	0.005**	H <sub>7</sub> diterima

\*t-statistik ≥ 1.96, signifikan

\*\*p-value ≤ 0.05, signifikan

*Sumber: Data Olahan SmartPLS (2023)*



Pada tabel 10, diketahui bahwa hubungan TLTA ( $X_2$ ) melalui KLK ( $Z$ ) terhadap PF ( $Y$ ) yang memiliki hubungan signifikan dengan nilai  $p$ -value  $0,005 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel laten Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Pencegahan *Fraud*.

### ***Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud***

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengendalian internal dan pencegahan penipuan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif terhadap upaya pencegahan penipuan. Dengan kata lain, penggunaan pengendalian internal dapat meningkatkan tingkat pencegahan penipuan. Hal tersebut sejalan dengan beberapa riset terdahulu, dalam penelitiannya Indriani (2021) dan Zarlis (2018) menyatakan bahwa melalui penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk mencegah kecurangan dapat memberikan jaminan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengendalian internal. Jika suatu lembaga memiliki pengendalian internal yang kuat, maka kesalahan dapat dihindari dan kecurangan dapat diminimalkan. Dalam lingkungan pengendalian, terdapat kualitas integritas dan moral yang dimiliki oleh karyawan & manajemen, serta dedikasi manajemen terhadap kompetensi, filosofi manajemen, dan gaya operasional organisasi. Faktor lain yang penting adalah struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, SDM, serta hubungan organisasi dengan pusat dan dewan legislatif. Dengan adanya lingkungan pengendalian yang efektif, dapat mencegah terjadinya tindakan penipuan. Meskipun terdapat beberapa riset terdahulu yang tidak sejalan dengan penelitian ini dimana dalam Wonar et al.(2019) dan Adiko et al.(2019) menunjukkan hasil yang tidak signifikan, salah satu penyebab utama yang mendasari adalah kurangnya komunikasi timbal balik terutama pada pimpinan dan kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian pada lingkungan kerja. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut menunjukkan hasil sebaliknya, dari hasil penyebaran kuesioner yang ada, penerapan sanksi tindakan disiplin terhadap pelanggaran kebijakan, prosedur atau norma perilaku dalam instansi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, penetapan standar kompetensi yang terstruktur dan komunikasi baik yang terjalin dalam instansi juga merupakan faktor pendukung yang sangat berperan dalam mencegah terjadinya *fraud* didalam lingkup instansi inspektorat se-Luwu Raya, adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud menunjukkan bahwa tujuan Inspektorat se-Luwu Raya dalam pengendalian internal organisasi telah berjalan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya optimal tapi upaya-upaya yang dilakukan dalam lingkup Inspektorat se-Luwu Raya seperti dibentuknya Tim Satgas SPIP serta adanya program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ada menjadi salah satu faktor dalam pencegahan *fraud*, hal tersebut tergambar dalam Renstra Inspektorat se-Luwu Raya dimana nilai capaian indeks maturitas SPIP yang levelnya meningkat setiap tahunnya yang artinya pelaksanaan praktik pengendalian internal terlaksana dengan baik.

### ***Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Pencegahan Fraud***

Hasil dari hipotesis kedua dalam riset ini menunjukkan hasil yang signifikan dimana tindak lanjut temuan audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Riset ini turut mendukung beberapa penelitian terdahulu. Aminah (2020) dan Mauristela (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat korupsi dipengaruhi oleh tindak lanjut temuan audit. Para pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan anggaran dengan bantuan auditor. Lembaga yang mengikuti rekomendasi dari auditor BPK telah berupaya untuk meningkatkan kinerja, pengendalian internal, dan memperbaiki kesalahan mereka untuk mengurangi tingkat korupsi. Semakin efektif tindak lanjut hasil audit yang dilakukan, menunjukkan semakin rendah potensi terjadinya fraud pada kantor Inspektorat se-Luwu Raya. Berdasarkan riset ini, para pimpinan di Inspektorat se-Luwu Raya secara konsisten melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh

auditor, menunjukkan implementasi yang baik terhadap tindak lanjut hasil audit, baik dari segi komitmen, kepedulian, tanggung jawab, patuh sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta pemenuhan sanksi dalam upayanya jika tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi yang diberikan.

### ***Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud***

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dimana kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini berbeda dengan penelitian Fahrurrozi (2019) yang menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan barang milik daerah. Kekuatan atau kelemahan pencegahan penipuan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengaruh laporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan barang milik daerah. Contoh salah satu bentuk kecurangan ialah salah menyajikan laporan keuangan yang dikendalikan (*fraudulent financial statement*) dimana tindakan yang diambil oleh manajer atau aparaturnya untuk menyajikan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya secara akurat. Tentu saja, penyusun laporan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi ini dikarenakan laporan keuangan itu sendiri bermasalah. Oleh karena itu, untuk mengungkap tindakan kecurangan tersebut, diperlukan tindakan, baik melalui prosedur pengendalian yang efisien maupun dalam prosedur audit.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, responden dilingkungan kerja Inspektorat se-Luwu Raya telah memberikan hasil berdasarkan kuesioner terkait bahwa kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut telah sesuai dan berpengaruh baik terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan (LK) pemerintah harus memiliki kualitas yang relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, & dapat dipahami. Kualitas LK yang baik akan dapat dengan baik mencegah kecurangan karena telah memenuhi standar dan prosedur yang sesuai. Hal tersebut tergambar dari capaian kinerja pelayanan Inspektorat se-Luwu Raya dalam 5 tahun terakhir dimana laporan keuangan instansi tersebut memperoleh predikat WTP oleh BPK RI. Laporan keuangan yang meraih predikat Wajar Tanda Pengecualian (WTP) dapat diberikan ketika sistem pengendalian internal memadai dan tidak terdapat salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang dimana hal tersebut dapat mempersempit peluang dan/atau kesempatan bagi pegawai/pejabat untuk melakukan tindakan kecurangan.

### ***Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan***

Riset ini telah melakukan uji hipotesis yang mengindikasikan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Lestari dan Dewi (2020) dan Fauzi (2022) dimana hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas audit internal dalam mengawasi laporan keuangan, akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh suatu instansi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan evaluasi pengawasan keuangan daerah secara terarah guna terus meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah juga terpengaruh jika pengendalian internal suatu lembaga buruk sehingga menimbulkan risiko kesalahan dan kecurangan. Di sisi lain, kualitas laporan keuangan daerah dan kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat dikurangi jika suatu lembaga memiliki pengendalian internal yang kuat.



### ***Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan***

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Imtinan (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan tindak lanjut dari hasil audit/pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan (LK). Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran atau rekomendasi BPK dapat meningkatkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan (LK). Dalam hal ini, LK yang akan datang akan lebih berkualitas jika hasil dan temuan audit ditindaklanjuti. Tingkat pengungkapan yang tinggi dapat dilihat pada laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan meningkat seiring dengan tingkat pengungkapan dalam laporan tersebut.

Selanjutnya, Hipotesis berikut mengujikan variabel independen tersebut diatas terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dengan variabel kualitas laporan keuangan sebagai mediasinya.

### ***Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud yang dimediasi oleh Kualitas Laporan Keuangan***

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa hubungan pengendalian internal melalui kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* tidak berpengaruh secara signifikan, hal tersebut memiliki hasil yang berbeda ketika diuji langsung sebelum menghadirkan variabel mediasi, dimana dalam pengujian ini kualitas laporan keuangan tidak mampu menghubungkan antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kecenderungan bahwa baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan ditentukan oleh SPI dalam suatu instansi, tidak sebaliknya. Dalam penelitian yang berbeda, Indriani (2021) menyatakan bahwa keberadaan SPI yang kuat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Akibatnya, kualitas laporan keuangan akan meningkat jika penipuan lebih berhasil dicegah. Noholo (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam upaya mencegah *fraud* dapat semakin ditingkatkan dengan adanya kompetensi SDM yang memadai, tetapi juga dapat menurun apabila kompetensi yang dimiliki oleh SDM tersebut tidak diikuti dengan tindakan konkrit dalam mengimplementasikan upaya pencegahan *fraud* untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### ***Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Pencegahan Fraud yang dimediasi oleh Kualitas Laporan Keuangan***

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tindak lanjut temuan audit melalui kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar  $0.005 < 0.05$ . Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil audit sesuai dengan saran atau rekomendasi dari pihak berwenang akan meningkatkan pengungkapan dalam laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya. Selain itu, semakin efektif tindak lanjut hasil audit yang dilakukan dengan laporan keuangan yang berkualitas akan memperkuat upaya pencegahan *fraud* dalam lingkup Inspektorat se-Luwu Raya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, dimana secara keseluruhan dari hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengendalian internal, tindak lanjut temuan audit & kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya baik dari ketiga variabel tersebut dapat meningkatkan pencegahan *fraud* di lingkungan Inspektorat se-Luwu Raya. Kemudian, pengendalian internal & tindak lanjut temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin

efektif implementasi sistem pengendalian internal, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, dengan menindaklanjuti temuan yang ditemukan selama audit, kualitas laporan keuangan akan meningkat, karena tingkat pengungkapan yang tinggi mencerminkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hubungan tindak lanjut temuan audit melalui kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pun memiliki hubungan yang signifikan, kualitas laporan keuangan mampu memediasi tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan *fraud*. Adapun hubungan pengendalian internal melalui kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* tidak berpengaruh secara signifikan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kecenderungan bahwa baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sistem pengendalian internal dalam suatu instansi, tidak sebaliknya. SPIP telah dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat beberapa aspek tertentu yang belum sepenuhnya dioptimalkan sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan menyeluruh & terarah terhadap SPIP, yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan & memperkuat langkah-langkah pencegahan kecurangan di dalam pemerintahan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya terbatasnya jumlah responden di setiap instansi yang terlibat, keterbatasan akan beberapa referensi artikel terkait variabel dan model penelitian yang digunakan. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan ini, penulis menguraikan terkait penelitian yang dapat dilakukan di masa depan berdasarkan temuan dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel lainnya. Kedua, penelitian ini dapat dilanjutkan baik pada instansi yang berbeda ataupun instansi yang sama dengan wilayah yang berbeda dari yang diteliti oleh penulis. Ketiga, dalam hal ini, diperlukan penelitian lanjutan yang dilakukan dalam periode yang lebih lama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran lebih jelas dimasa depan.

## REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Adiko, R. G., Astuti, W., & Hafisah. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud di PT. Inalum. *JAKK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1) 52-68.
- Aditya, F., & Nurbaiti, A. (2020). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Bagian Wilayah Sumatera Barat). *E-Proceeding of Management*, 7(2) 2710-2722.
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi. *Journal Accounting and Finance*, 4(2) 94-104.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor Internal*. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Armelia, P.A., & Wahyuni, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. In *VJRA*, 9(2) 61-70.
- Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission (COSO). (1992). *Internal Control Integrated Framework*. AICAP Publication.
- Fahmi, M., & Syahputra, M.R. (2019). Peranan Audit Internal dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1) 24-36.
- Fahrurrozi, H. (2019). Pengaruh Penggunaan SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(2) 124-138.
- Fauzi, E., & Wardono, D.U. (2022). Peran Internal Audit atas Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan. In *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (Issue 7)*, 2(1) 24-36.



- Ghozali, H. I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Edisi 3)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Jr. J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Switzerland: Springer.
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud. *Jiakes*, 10(3) 523-532.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian*. Jakarta Pusat: PT Inkubator Penulis Indonesia (Institut Penulis Indonesia).
- Imtinan, G., & Hasibuan, D.H. (2020). Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2) 215-224.
- Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Financial And Tax*, 1(2) 70-85.
- Iriansyah., Usman, H., & Duriani, D. (2020). Pengaruh Locus of Control dan Sikap Rekan Kerja terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2) 46-54.
- Juniati, R. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1) 123-132.
- Komisi Pemberantas Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK.
- Kustiawan, M. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Berimplikasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, XX(3) 345-362.
- Lestari, N.L.W.T., & Dewi, N.N.S.R.T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2) 170–178.
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(2) 278-193.
- Mauristela, & Haryanto. (2022). Efektivitas Temuan Fraud Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Opini Audit oleh BPK dalam Mempengaruhi Tingkat Korupsi pada Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2) 1-10.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 20(2) 130-137.
- Maulana, D. (2020). Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1) 39-53.
- Muhson, A. (2022). *Analisis Statistik dengan SmartPLS*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Musdafia, I., & Amanda, L. (2019). Upaya Pencegahan dan Kecenderungan Untuk Melakukan Fraud pada Laporan Keuangan. *JRAA*, VI(1) 34-42.
- Noholo, S. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Intervening Pencegahan Fraud. *Jambura Accounting Review*, 2(2) 136–147.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
- Susanti, E.Y., & Budiwitjaksono, G.S. (2019). Fraud Diamond Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 2(2) 207-223.
- Triwahyudi, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Berimplikasi pada Pencegahan Fraud pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, Buku 2*, 2.39.1-6.
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R.M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*, 2(4) 106-125.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, J.C Bill. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 63-89.
- Yamin, S. (2023). *Olah Data Statistik: SMARTPLS 3, SMARTPLS 4, AMOS & STATA Edisi III*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Zarlis, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud di Rumah Sakit (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta di Jabodetabek). *Jurnal Transparansi*, 1(2) 206-217.

